KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

8INYWJ3S

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 1 4 5			H.4 X	H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 4 9 9 2 7 6 2 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : HARYATI							
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	-	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
3 21-402-01	798.100	798.100	0	5	39.905	;	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022							
Nama Dokume	en Biaya Pembayaran	Tanggal 1 6	<b>dd</b> 0 3	] mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor :		Tanggal	dd	] mm	уууу		
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	162722	0 0 0				
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAEF	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KA	ALIMANTAN	ITIMUR		
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal :	1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :	HARI JUMADI						
	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah sa	ıya isi dengan	ı benar dan telah saya		
	Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperlu	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara		